

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara akan berupaya mempercepat pembangunan yang akan berdampak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Keadaan ekonomi di suatu wilayah tercermin dari pembangunan ekonomi yang terdistribusi merata kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan secara makro. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur bertambah, perusahaan berkembang, pendidikan dan teknologi meningkat, kesempatan kerja bertambah, pendapatan naik, dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2016). Untuk meningkatkan kesejahteraan diperlukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berorientasi jangka panjang sebagai indikator dalam mencapai tujuan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari kemampuan suatu wilayah dalam menyerap tenaga kerja secara optimal (Herina et al., 2025).

Dalam proses tersebut, tenaga kerja berperan sebagai tulang punggung utama karena menyediakan sumber daya manusia yang kompeten untuk menggerakkan sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai. Berdasarkan World Bank, 2025 Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk paling padat keempat di dunia sehingga selalu berhadapan dengan isu-isu terkait dengan ketenagakerjaan. Faktor munculnya masalah ketenagakerjaan ini disebabkan oleh bertambahnya

jumlah tenaga kerja setiap tahunnya. Kenaikan tenaga kerja ini jika tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan maka penyerapan tenaga kerja akan terbatas dan menghasilkan angka pengangguran yang tinggi jika tidak ditangani dengan baik.

Tabel 1. 1 Daftar Angkatan Kerja Indonesia

Tahun	Angkatan Kerja (Jiwa)			Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	Persentase AK terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK		
2017	121.022.423	7.040.323	128.062.746	192.079.416	66,67
2018	126.282.186	7.073.385	133.355.571	198.126.553	67,31
2019	128.755.271	7.104.424	135.859.695	201.185.014	67,53
2020	128.454.184	9.767.754	138.221.938	203.972.460	67,77
2021	131.050.523	9.102.052	140.152.575	206.708.299	67,80
2022	135.296.713	8.425.931	143.722.644	209.420.383	68,63
2023	139.852.377	7.855.075	147.707.452	212.587.441	69,48
2024	144.642.004	7.465.599	152.107.603	215.371.168	70,63

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilihat dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah. Informasi mengenai kondisi kerja di Indonesia dapat dilihat berdasarkan tabel di atas. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS, banyaknya penyerapan tenaga kerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengangguran. Diketahui bahwa dari tahun 2017 hingga 2024 jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja cenderung meningkat setiap tahunnya. Sejalan dengan meningkatnya angkatan kerja, pada 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga mengalami peningkatan sebesar 1,14 persen dibanding tahun 2023 dan ini merupakan persentase tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Peningkatan angka tersebut secara terus menerus mengindikasikan bahwa sisi penawaran terhadap tenaga kerja meningkat.

Saat terjadinya Covid-19 di tahun 2020 terlihat penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan sebesar -0,23 persen dibanding tahun sebelumnya dan terjadi peningkatan pengangguran yang signifikan hampir di semua provinsi di Indonesia. Berbagai sektor ekonomi terdampak yang menyebabkan penurunan jumlah pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan sehingga angka pengangguran meningkat drastis menjadi 9,7 juta jiwa. Meski demikian, pemulihan ekonomi tercatat pada periode 2021 – 2024, ditandai dengan peningkatan signifikan jumlah tenaga kerja. Akan tetapi, isu pengangguran belum sepenuhnya terselesaikan karena tingkat pengangguran masih berada di angka 7 juta jiwa.

Sementara itu, populasi yang terus bertambah juga memperburuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan kesempatan kerja, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi (Tamba & Aprianti, 2025). Sehingga walaupun penyerapan tenaga kerja tetap dan angka pengangguran menurun, penciptaan lapangan kerja masih menjadi masalah ketika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Hal tersebut juga didukung dengan laporan IMF yang mencatat tingkat pengangguran Indonesia sebesar 5,2% tertinggi di ASEAN.

Terlebih, Indonesia juga dihadapkan pada bonus demografi, bersumber dari BPS tingginya populasi dengan usia produktif di Indonesia tahun 2024 sebesar 70% dari total penduduk. Bonus demografi ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik namun, juga berisiko jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup

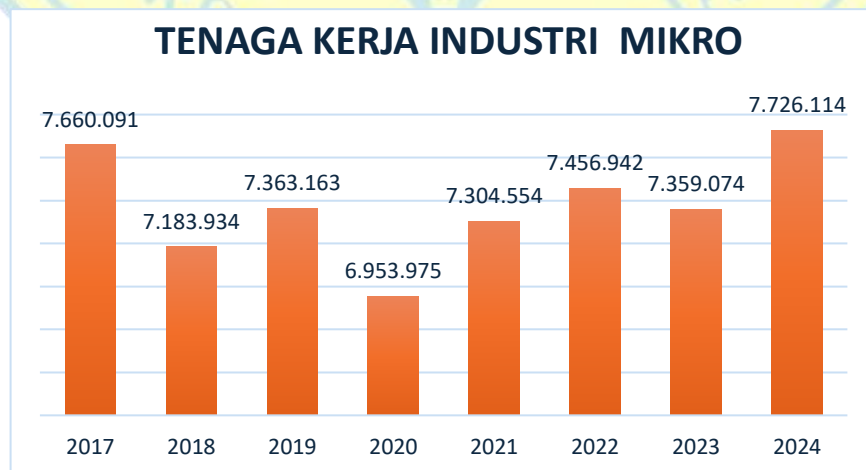
dan sumber daya manusia di usia produktif yang dapat berkontribusi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya (Nainggolan & Budiman, 2024).

Bonus demografi dapat menjadi kendala tersendiri, karena persentase populasi yang meningkat tidak selalu sejalan dengan keberhasilan pembangunan, justru terkadang menjadi beban bagi perkembangan itu sendiri. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperluas kapasitas penyerapan tenaga kerja merupakan bentuk strategis yang harus dioptimalkan untuk mengubah populasi usia kerja yang terus bertambah menjadi potensi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi menjadi sangat penting diperhatikan.

Perkembangan sektor industri kini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong ekonomi Indonesia. Di tengah perubahan struktural ekonomi, kontribusi sektor industri dalam menyediakan lapangan pekerjaan sangat krusial (Pratnyaloka & Khusaini, 2025). Salah satu bidang usaha yang diharapkan dapat membuka peluang kerja adalah bidang industri kecil dan mikro. Industri kecil dan mikro dinilai mampu bertahan dalam situasi krisis ekonomi. Pernyataan tersebut terlihat ketika terjadi krisis pada tahun 1998, yang menunjukkan industri mikro dan kecil tetap bertahan dan semakin bertambah setelah krisis terjadi. Salah satu alasan industri dapat bertahan dan berkembang setelah krisis adalah karena banyak orang yang memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan akibat pemutusan hubungan kerja yang terjadi besar-besaran di sektor industri besar (Zahra & Haryatiningsih, 2024).

Kontribusi industri mikro terhadap perekonomian nasional tidak hanya terbatas pada banyaknya jumlah unit usaha, tetapi juga mencakup kemampuan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja lokal, khususnya bagi orang-orang yang baru memasuki usia produktif. Sektor industri tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pendukung dalam memperkuat ekonomi negara dengan kontributor terbesar terhadap PDB Indonesia (Amalia & Woyanti, 2020). Berdasarkan data BPS, UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB Indonesia serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja.

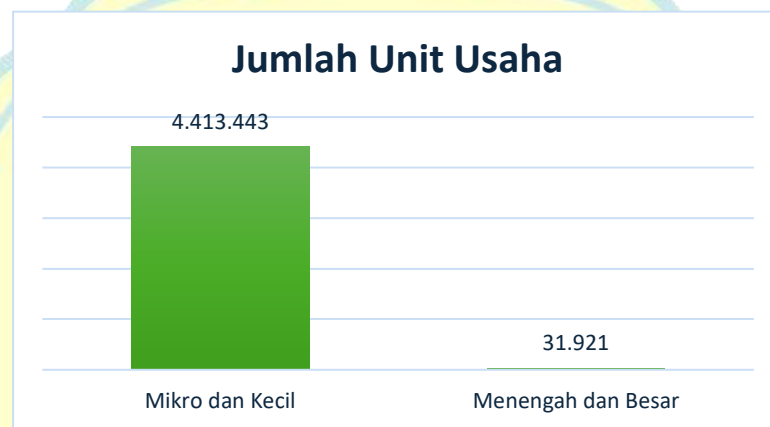
Kontribusi industri mikro terhadap perekonomian nasional tidak hanya terbatas pada banyaknya jumlah unit usaha, tetapi juga mencakup kemampuan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja lokal, khususnya bagi orang-orang yang baru memasuki usia produktif. Beberapa tahun terakhir, industri mikro mengalami pertumbuhan yang baik hingga dapat berpotensi menyerap tenaga kerja di Indonesia.



Gambar 1. 1 Data Tenaga Kerja Industri Mikro

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, jumlah tenaga kerja industri mikro di Indonesia cenderung stabil dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Selama masa pandemi Covid-19 yang disertai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara luas, sejumlah besar pekerja beralih ke usaha mikro guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



Gambar 1. 2 Jumlah Unit Usaha

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika berdasar pada gambar 1.2 jumlah unit usaha pada sektor industri mikro dan kecil terlihat perbandingan yang cukup besar. Maka dari itu, sektor industri mikro dan kecil pun muncul sebagai salah satu pendorong utama pemulihan roda ekonomi nasional di Indonesia. Berbagai individu yang sebelumnya bergelut di sektor formal kini berpindah ke sektor informal, dipicu oleh beberapa dinamika yaitu pertama, transformasi pola konsumsi masyarakat dari konvensional ke daring, yang mendorong ekspansi tenaga kerja di ranah ini; kedua, intervensi pemerintah melalui kebijakan restrukturisasi kredit, tambahan modal usaha, keringanan tagihan listrik, serta skema pembiayaan pendukung lainnya bagi industri mikro, kecil, dan menengah. Inovasi serta

adaptasi cepat ini melahirkan beragam produk baru, yang pada gilirannya merangsang peningkatan permintaan tenaga kerja.

Pada tahun 2022, penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, seiring maraknya kemunculan industri mikro di bidang makanan, minuman, pakaian, serta sektor terkait lainnya. Meski demikian, peningkatan tersebut belum cukup kuat untuk menurunkan tingkat pengangguran secara keseluruhan di Indonesia. Secara ideal, industri mikro diharapkan mampu menyerap 1 – 4 pekerja per unit usaha.

Dalam mendorong pengembangan usaha mikro, pemerintah telah mengimplementasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan berbunga rendah yang ditujukan bagi pelaku UMKM. Sejak tahun 2017 hingga 2024, realisasi penyaluran KUR menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, baik dari sisi jumlah debitur maupun total nominal pembiayaan. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan nilai output usaha mikro, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Sari & Arka, 2023) kredit usaha rakyat berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja usaha, sebab peningkatan jumlah pekerja yang terlibat dalam proses produksi cenderung mendorong peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh kontribusi rata-rata produksi marginal tenaga kerja yang lebih tinggi akibat penambahan input pekerja.

Faktor lain yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor industri mikro adalah nilai output atau nilai produksi. Fluktuasi nilai produksi ini secara langsung berkontribusi terhadap perubahan jumlah tenaga kerja yang diserap. Ketika nilai output mengalami peningkatan, perusahaan industri biasanya merespons dengan ekspansi kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas tersebut tentu saja menuntut penambahan tenaga kerja guna mendukung proses manufaktur barang secara efisien. Selain itu, tingginya output mencerminkan optimalisasi proses produksi, yang pada gilirannya memerlukan lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

Tabel 1. 2 Data Nilai Output Industri Mikro

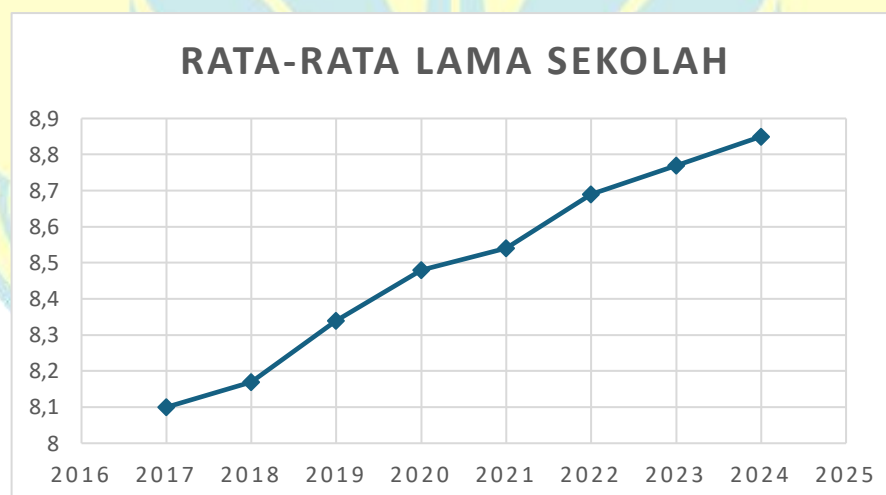
TAHUN	NILAI OUTPUT
2017	374.116.303,00
2018	360.399.708,00
2019	347.504.988,00
2020	317.723.642,00
2021	384.935.926,00
2022	388.303.055,00
2023	394.526.466,00
2024	400.267.474,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai produksi memegang peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan sektor industri, sebab peningkatan output secara signifikan mendukung pengembangan industri secara keseluruhan. Semakin besar nilai output yang dicapai, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh pelaku industri, sehingga memicu munculnya ekspansi usaha baru dan memperluas kesempatan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang disajikan, nilai output tahunan

menunjukkan pola fluktuatif yang terlihat dengan titik terendah tercatat pada 2020 sebesar Rp 317 juta dan nilai tertinggi berada pada 2024 sebesar Rp 400 juta. Titik terendah tersebut terjadi dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga para pelaku usaha cenderung menahan atau mengurangi output produksinya akibat gangguan proses produksi. Namun, pada tahun berikutnya pelaku usaha mikro dapat pulih kembali dan dapat menghasilkan output sebesar Rp 384 juta.

Mulai 2021 hingga 2023, output kembali menguat dengan tren peningkatan, didorong oleh munculnya industri baru, yang sekaligus berkontribusi pada ekspansi penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Gulo et al., (2022) nilai output berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja.



Gambar 1. 3 Data Rata-rata Lama Sekolah

Sumber: Badan Pusat Statistik

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui rata-rata lama sekolah turut menentukan kemampuan sektor mikro dalam menyerap tenaga kerja. Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Becker (1964) menjelaskan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja

sehingga berdampak pada peningkatan output dan kesempatan kerja. Akan tetapi, rata-rata lama sekolah tenaga kerja di sektor mikro masih relatif rendah dibandingkan sektor formal lainnya, sehingga berpotensi membatasi kapasitas ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja baru.

Data pada gambar tersebut menggambarkan tren peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia dari tahun ke tahun, walaupun kenaikannya cenderung tidak signifikan. Meski demikian, nilai RLS penduduk Indonesia masih berada di bawah sembilan tahun, padahal pemerintah telah menerapkan program wajib belajar selama 12 tahun. Tingkat pendidikan individu memiliki pengaruh substansial terhadap produktivitas kerja, karena pendidikan berfungsi sebagai modal utama untuk memenuhi standar dan kriteria pekerjaan yang ditetapkan perusahaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula kapasitas kerja (*working capacity*) seseorang. Pendidikan formal pun menjadi prasyarat krusial yang diberlakukan pemberi kerja terhadap calon tenaga kerja. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi syarat esensial bagi masyarakat untuk diterima dalam dunia kerja, tetapi juga berkontribusi dalam menekan tingkat pengangguran secara keseluruhan.

Literatur yang bersumber dari Zahra & Haryatiningsih (2024) mengungkapkan bahwa peningkatan nilai output berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja mikro. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Hasna et al. (2021) temuan tersebut menyatakan bahwa Tingginya permintaan dari konsumen akan mendorong peningkatan nilai output yang dihasilkan oleh industri mikro dan kecil. Untuk memenuhi

kebutuhan produksi tersebut, pelaku usaha pada sektor ini cenderung menambah kapasitas usahanya, salah satunya melalui pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, karakteristik industri mikro dan kecil yang umumnya bersifat padat karya juga membuat sektor ini membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Hal ini dilakukan agar proses produksi dapat berjalan optimal dan mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

Selanjutnya literatur dari Ilham & Anis (2022) menunjukkan rata rata lama pendidikan sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap tenaga kerja. Tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, sehingga mampu berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi serta pengembangan usaha. Peningkatan produktivitas tersebut pada akhirnya dapat memperluas skala usaha dan mendorong terciptanya tambahan lapangan kerja. Selain itu, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan usaha baru, yang pada akhirnya turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Namun, beragam penelitian masih ditemukan hasil yang tidak konsisten, seperti dalam studi Malta & Ariusni (2023) menunjukkan nilai output berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya pada penelitian Widia & Samsuddin (2025) menemukan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut terjadi meskipun mutu pendidikan membaik, tidak berdampak secara langsung pada peningkatan tenaga kerja yang terserap.

Dari sisi kebijakan pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat, terdapat inkonsistensi dari studi yang dilakukan oleh Sujarweni & Utami (2015) menunjukkan bahwa KUR meningkatkan jam kerja dan omset, namun penggunaan modal tersebut lebih difokuskan pada pembelian alat (padat modal) sehingga tidak ada penambahan tenaga kerja baru yang signifikan secara statistik. Hal ini sejalan dengan Prasetyaningrum et al. (2024) yang menunjukkan bahwa modal tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja industri di Pulau Jawa. Dalam temuan tersebut disimpulkan bahwa terdapat faktor lain yang lebih berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan penelitian tersebut, perbedaan hasil menjadikan sebuah kesenjangan yang menjadi celah. Adapun perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak pada cakupan industri yang dikaji, variabel yang digunakan, serta periode waktu penelitian. Penelitian ini secara khusus berfokus pada sektor industri mikro yang masih relatif terbatas pembahasannya, terutama dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini lebih luas karena mencakup seluruh provinsi di Indonesia, berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada wilayah atau daerah tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan industri mikro berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja tingkat provinsi di Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kredit usaha rakyat, nilai output, dan pendidikan yang tergolong dalam

Industri Mikro. Ketiga variabel tersebut merepresentasikan dinamika perkembangan IMK di masing-masing provinsi. Sementara itu, variabel dependen yang digunakan adalah jumlah tenaga kerja pada sektor industri mikro di tingkat provinsi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan periode pengamatan tahun 2017 hingga 2024 dan mencakup seluruh provinsi di Indonesia.

Pemilihan topik ini didasari oleh uraian permasalahan, temuan data empiris, serta celah penelitian yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penelitian ini dianggap krusial karena tenaga kerja mikro berperan strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional sekaligus menekan angka pengangguran melalui mekanisme penyerapan tenaga kerja yang masif. Dengan demikian, penelitian ini dirumuskan dalam judul “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat, Nilai Output, dan Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Mikro di Indonesia”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap penyerapan tenaga kerja industri mikro di Indonesia?
- 2) Bagaimana pengaruh nilai output terhadap penyerapan tenaga kerja industri mikro di Indonesia?

- 3) Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri mikro di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap penyerapan tenaga kerja industri mikro di Indonesia.
- 2) Mengetahui pengaruh nilai output terhadap penyerapan tenaga kerja industri mikro di Indonesia.
- 3) Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri mikro di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi perekonomian Indonesia secara umum serta dinamika penyerapan tenaga kerja secara khusus. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang membahas penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai landasan seklaigus bahan pertmbangan bagi pemerintah dlama merumuskan dan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

